

# **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DARI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI GRESIK KELAS IA PERIODE APRIL 2023- JUNI 2023**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai indeks persepsi korupsi , oleh karena itu Pengadilan Negeri Gresik mengadakan survey dengan menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dengan mengisi kuisioner baik secara manual maupun secara elektronik;

Diharapkan pendapat masyarakat tersebut menjadi gambaran tentang keadaan Pengadilan Negeri Gresik apakah masih melakukan praktek-praktek korupsi ataukah sudah bersih dari praktek-praktek korupsi;

Survey tersebut dilakukan atas 151 responden dengan tingkat prosentasi kategori pendidikan Sarjana 48,34% orang dengan pengguna layanan dalam kelompok usia produktif usia antara 29 tahun sampai 39 tahun;

## **TUJUAN**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Survey indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Gresik;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan Hasil Survey yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki layanan.

## **DASAR HUKUM**

1. UU no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. UU no. 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public;
4. UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan public;
5. Permenpan RB No. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mentri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI no. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;

7. Peraturan Presiden RI no. 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019

### HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut :

No	Monitoring	Evaluasi
1	Dari 5 ruang lingkup survey indeks persepsi anti korupsi menggambarkan bahwa pengguna / penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan indeks 3,97 atau 99,17 % masuk dalam kategori persepsi Kinerja unit pelayanan <b>BERSIH DARI KORUPSI</b> dimana nilai interval korupsi berada pada angka 81,26-100	Agar capaian tersebut tetap dipertahankan;
2	Bahwa dari ruang lingkup tersebut didapatkan 2 kategori ruang lingkup tertinggi yaitu pada tidak ada pungutan liar (pungli), Tidak ada Pencalonan/ perantara tidak resmi;	Untuk ruang lingkup yang tertinggi ada 2 ruang lingkup dengan nilai yang sama yang membuktikan bahwa Pengadilan negeri Gresik Bebas dari pungutan liar dan percalon;
3	Bahwa ruang lingkup dalam indek persepsi korupsi yang perlu ditingkatkan adalah 3 unsur terendah yaitu <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak ada diskriminasi pelayanan dengan score 3,94</li><li>2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan dengan score 3,95</li><li>3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang / Fasilitas dengan score 3,97</li></ol>	Perlu dicermati dasar-dasar mengapa bukti pembayaran , biaya tambahan dan tariff dan biaya menjadi ruang lingkup terendah, sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan layanan khususnya terhadap 3 unsur terendah

### KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai indeks persepsi korupsi diperoleh Hasil terhadap 2 ruang lingkup yang mempunyai nilai tertinggi yang sama di Pengadilan Negeri Gresik yaitu pada

tidak ada pungutan liar, tidak ada pencaloan/ perantara tidak resmi sehingga menggambarkan bahwa pengguna jasa/penerima layanan merasa **PELAYANAN di PENGADILAN NEGERI GRESIK** untuk pungutan liar dan pencaloan, sehingga sudah sangat baik terlihat dari score terhadap unsur tersebut nilai rata-rata 3,98 dan **PENGADILAN NEGERI GRESIK BERSIH DARI KORUPSI** membuktikan tidak ada pungutan liar dan tidak ada percaloan namun masih terdapat ruang lingkup dengan nilai score terendah namun yaitu tidak ada diskriminasi pelayanan dengan score 3,94, Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan dengan score 3,95 , tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas dengan score 3,97 namun demikian nilai terendah tersebut masuk dalam interval 3,26 - 04,00 yang artinya nilai tersebut mendekati nilai perfect yang artinya persepsi Pengadilan Negeri Gresik "**BERSIH DARI KORUPSI**";

#### **REKOMENDASI**

- Agar penggunaan anjungan mandiri dimaksimalkan agar pihak yang berperkara tidak berhadapan langsung dengan petugas;
- Agar semua pengguna layanan diperlakukan sama, yaitu sama-sama memperoleh layanan yang cepat, efisien dan tepat;
- Pengadilan Negeri Gresik selalu memperdengar pengumuman baik di ruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi Pengadilan Negeri / hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang tambahan terkait pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, juga pengumuman dari Ketua Mahkamah Agung agar semua Warga Pengadilan menjaga integritas hal tersebut juga diumumkan di website Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang tambahan dari pegawai / petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;

- Pengadilan Negeri Gresik juga melakukan transparansi mengenai pelayanan sehingga tidak pernah melakukan pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan;

Sekretaris



MOHAMMAD HAMIDI ,SH.MH

Ketua TIM SURVEY



SRI SULASTUTI, SH